BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya PERUM PERUMNAS Regional IV Bandung

Masalah sebenarnya telah muncul sejak zaman penjajahan, namun belum ada kegiatan kearah usaha pengadaan perumahan rakyat aktif. Pembangunan perumahan pada saat itu diarahkan untuk pengadaan rumah pegwai negeri saja yang dilaksanakan oleh Jawatan Gedung-gedung Negara.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Setelah kemerdekaan, keluarlah Kepres No. 65 Tahun 1952 tanggal 25 April 1952 tentang Pembentukan Jawatan Perumahan Rakyat dalam Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Kemudian dibentuk Badan Pembantu Perumahan, Yayasan Kas Pembangunan dan Pembentukan suatu Bank Pembangunan Perumahan yang akan memberikan pinjaman pada Yayasan Kas Pembangunan.

Pada tahun 1963 dibentuk Badan Perancangan Perumahan (BBP), dan tahun 1972 diselenggarakan lokakarya nasional di Jakarta mengenai kebijaksanaan perumahan dan pembiayaan pembangunan. Hasil lokakarya tersebut antara lain perlunya pembentukan badan usaha yang dapat berwenang untuk mengadakan penyediaan dan pembangunan perumahan rakyat.

Dengan Kepres no. 35 tahun 1974 dibentuklah Badan Kebijaksanaan Perumahan Rakyat Nasional (BKPN) yang berfungsi merumuskan garis-garis kebijaksanaan serta petunjuk pelaksanaan dibidang pengembangan dan pembinaan perumahan. Dan untuk pembiayaannya, maka Menteri Keuangan menunjuk Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai Bank Hipotik Perusahaan.

Program penyediaan perumahan rakyat melibatkan jual beli rumah dan tanah yang hanya dapat ditopang oleh Badan Usaha Negara. Sehingga keluarlah Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1974, kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1988 yaitu pembentukan perusahaan umum. Pembangunan Perumahan Nasional disingkat PERUMNAS dengan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pembangunan perumahan rakyat dan prasarana lingkungan di daerah perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sampai menengah.

PERUM PERUMNAS di Bandung semula dibentuk perjanjian kerjasama dengan Direktorat Departemen Penyelidik Umum di Bandung. PERUM PERUMNAS di Bandung makin lama makin berkembang dengan dilaksanakannya pembangunan perumahan dibeberapa lokasi.

Berdasarkan perkembangan tersebut maka PERUM PERUMNAS menerbitkan Syarat Keputusan tentang pembentukan Kantor Cabang Bandung yang terpisah dari proyek PERUM PERUMNAS Bandung yang masing-masing berdiri sendiri dengan tugas dan tanggung jawab sebagai unit pelaksana di Bandung sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIRUT 364/KPTS/1980 tanggal 1 April 1980. Karena makin berkembangnya struktur organisasi dan semakin banyaknya beban kerja yang dihadapi maka pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan seefisien mungkin.

Sampai saat ini PERUM PERUMNAS memiliki 7 (tujuh) cabang di seluruh Indonesia yaitu :

1. Cabang I dengan kedudukan kantor cabang di Medan
2. Cabang II dengan kedudukan kantor cabang di Jakarta
3. Cabang III dengan kedudukan kantor cabang di Jakarta

4. Cabang IV dengan kedudukan kantor di Bandung
5. Cabang V dengan kedudukan kantor cabang di Semarang
6. Cabang VI dengan kedudukan kantor cabang di Ujung Pandang

2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Kerja

Struktur organisasi merupakan landasan organisasi untuk menentukan pembagian tugas, tanggung jawab dan pelimpahan wewenang secara jelas. Sehingga koordinasi stuktural dapat dilaksanakan dengan baik guna menunjang aktivitas perusahaan.

Stuktur organisasi PERUM PERUMNAS cabang IV berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.DIRUT 78/PKTS/10/99, tanggal 30 Juli 1999 terdiri dari :

a. GM Regional

   Bersama – sama Deputy GM Regional memimpin para manager bagian kantor regional, manager cabang untuk menyusun rencana kerja, sasaran dan anggaran kantor regional.

b. Deputy GM Regional

   Mempunyai tugas memberikan penugasan, pengendalian, dan pembinaan serta penilaian kerja kepada asisten manager.

c. Manajer Bagian Perencanaan dan Pertanahan

   Mempunyai tugas untuk menyusun perencanaan pembangunan rumah.

d. Manajer Produk, Pengolahan dan Peremajaan Lingkungan

   Mempunyai tugas bertanggung jawab untuk mengatur lokasi pembangunan.

e. Manajer Keuangan

Mempunyai tugas mengolah sumber daya dan dana bagian keuangan untuk melaksanakan kegiatan kantor regional dan cabang.

f. Manajer Cabang

Mempunyai tugas memimpin langsung perusahaan cabang.

Adapun tugas-tugas Pokok Unsur Pelaksanaan dari sub Bagian Kepegawaian PERUM PERUMNAS Regioanl IV Bandung adalah :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pengolahan SDM di Kantor Regioanl Kantor Cabang dan kantor-kantor unit.
2. Melaksanakan penyelengaraan administrasi kegiatan kepegawaian.
3. Melaksanakan pembinaan SDM dalam lingkup dan tanggungjawabnya.
4. Mengurusi kesejahteraan karyawan dalam pemberian kebijakan yang diberikan perusahaan pada pegawainya.
5. Bersama Asisten Manajer program usaha, data dan informasi, Asisten Manajer Umum, perlengkapan dan kearsipan, Asisten Manajer Hukum, Asisten Manajer PUKK membantu GM Regional, Deputy GM Regional dan penyelenggaraan kegiatan perusahaan.

(Lampiran Stuktur Organisasi di halaman 21)

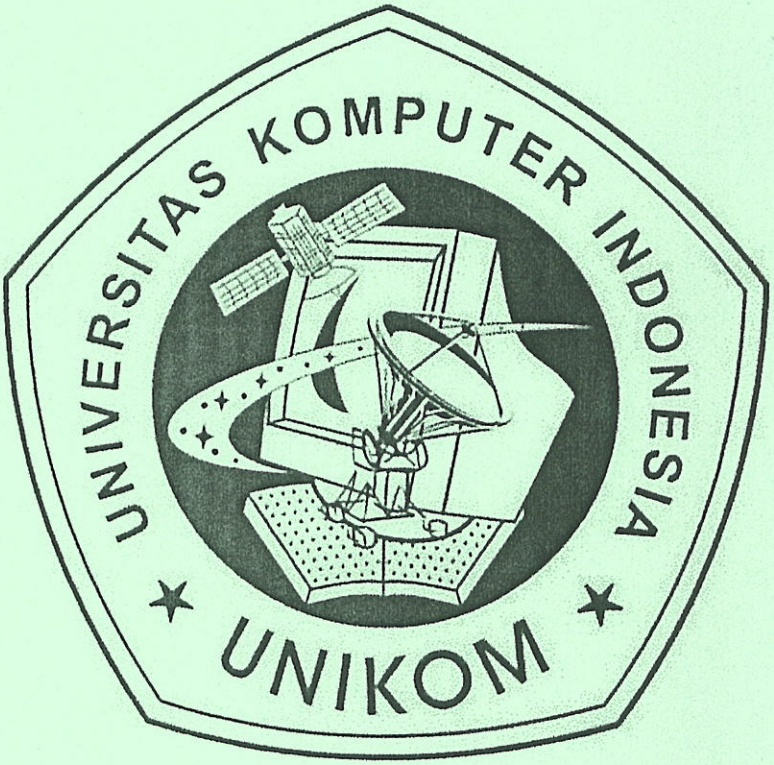
2.3 Aspek Teknologi Yang Ada

2.3.1 Software yang ada

Software yang digunakan terdiri dari Ms.Word dan Ms.Excel. Ms.Word digunakan dalam pembuatan Surat Permohonan Restitusi Kesehatan (Lampiran di halaman 25), Surat Pengantar Berobat (SPB), Surat Persetujuan Restitusi Perawatan Kesehatan (Lampiran di halaman 26). Ms.Excel digunakan dalam rincian pengeluaran biaya dan data karyawan.

2.3.2 Hardware yang digunakan

Hardware yang digunakan terdiri dari 2 unit komputer, Hardisk 1.2 GB, Memori 16 MB, MotherBoard Pentium 100, Monitor BRG 14", Printer Epson LX-300.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM